



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/3518>

PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA ABAD 19-20

Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani¹, Yasinta Putri Kristanti²

Universitas Negeri Malang, Indonesia¹

E-mail: zofranosejarah22@gmail.com, yasintakristanti@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima Juli 2020, Disetujui Agustus 2020, Dipublikasikan September 2020

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan agar dapat memahami berbagai macam pelaksanaan pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia setelah Politik Etis diberlakukan. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda memiliki banyak sekali sistem pengajaran dan pembelajaran yang dibangun Belanda berdasarkan kelompok sosial seperti sekolah untuk pribumi, Belanda/Eropa, dan Timur Asing. Politik yang dijalankan oleh Belanda yaitu Politik Etis merupakan ujung tombak terciptanya pendidikan-pendidikan modern di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari pendidikan zaman kolonial Belanda yaitu munculnya pembelajaran dengan pendidikan modern yang menumbuhkembangkan nasionalisme dan pengajaran berbasis *soft skill* dalam memenuhi kebutuhan tenaga terampil. Dengan demikian, perkembangan dan pelaksanaan pendidikan di zaman kolonial Belanda di Indonesia memiliki tujuan meningkatkan martabat bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata Kunci: pendidikan, zaman kolonial Belanda, dan sekolah.

Abstract

This article has the aim of understanding various types of education in the Dutch colonial era in Indonesia after the Ethical Policy was put in place. Education in the Dutch colonial era had many teaching and learning systems built by the Netherlands based on social groups such as schools for *pribumi* (natives peoples), Dutch/European, and Foreign East. The politics that is run by the Dutch, namely Ethical Politics is the spearhead of the creation of modern education in Indonesia. The research method used is library research methods. The result of Dutch colonial education is the emergence of learning with modern education that fosters nationalism and soft skill-based teaching in meeting the needs of skilled workers. Thus, the development and implementation of education in the Dutch colonial era in Indonesia had the aim of enhancing the nation's dignity and educating the nation's life.

Keyword: education, Dutch colonial era, and school.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sehari-hari. Dalam menyelenggarakan pendidikan itu sendiri banyak faktor yang memengaruhinya baik faktor internal maupun eksternal pada sistem pendidikan.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah suatu hasil perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan di dorong oleh kebutuhan praktis perkembangan zaman. Sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh rakyatnya, bagaimana sejarah pendidikan di masa lampau dapat melahirkan

cendekiawan yang menggagas dasar kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Begitu pula dengan masa itu, Indonesia yang mengalami perkembangan dari masa klasik hingga sekarang melalui proses perkembangan dalam pendidikannya (Rifa'i, 2011). Sebab, pemerintah kolonial antara 1875 dan 1900 dua ratus lima puluh juta gulden telah dihabiskan untuk pembangunan rel kereta api, pelabuhan, dan irigasi (Furnivall, 1944: 211; Penders, 1968: 32).

Seperti yang kita lihat dari para tokoh-tokoh besar juga merupakan lulusan lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan Barat. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar dari suatu bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Pendidikan pada abad ke-20 merupakan kelanjutan dari abad sebelumnya dengan perkembangannya yang sangat pesat mengalami kemajuan terutama memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil. Pendidikan pada masa itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial dan golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Ada banyak perbedaan pelayanan anak-anak bumiputera/pribumi dengan anak-anak Belanda/Eropa yang berkaitan dengan status mereka. Terjadinya perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia perubahan kebijakan politik menjalankan watak kolonialisme di Indonesia. Pendidikan pertama kalinya dikaitkan dengan bagaimana mengukuhkan kekuasaannya. Banyak sekolah yang mulai berdiri di abad ke-20 munculnya sekolah-sekolah swasta dan para kaum cendekiawan sehingga memunculkan organisasi modern di masa pergerakan nasional (1908-1942).

Dengan demikian pendidikan gaya Barat telah mampu melemahkan pamor priyayi tradisional, tetapi telah memunculkan kelas baru orang Indonesia yang memiliki kesadaran politik yang telah menggunakan bentuk baru yang dipersiapkan untuk

reformasi politik, mengambil peran utama dalam agitasi radikal, baik di kota maupun di desa. Program Politik Etis yang beru-paya mengembangkan pendidikan Barat untuk bumiputera/pribumi, tetapi dalam Kenyataannya program tersebut telah menanamkan kesadaran nasionalisme, untuk mengambil alih sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan sistem yang telah lama ada di berpengaruh dalam sistem pendidikan adat. Di sisi lain, kenyataan ini telah membangkitkan keinginan untuk meningkatkan martabat bangsa yang dicari oleh organisasi modern masa itu (Sumarno, Aji, & Hermawan, 2019: 372).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode ini menggunakan studi pustaka sebagai obyek penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan dan sumber primer (Zed, 2014). Adapun bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan berasal dari Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) dan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Tahap dari metode penelitian kepustakaan adalah membaca terlebih dahulu mengenai pendidikan pada masa kolonial Belanda di Indonesia dengan mencari referensi yang mendukung pokok permasalahan di perpustakaan yang mudah di jangkau. Selanjutnya membuat artikel di *microsoft word* dengan membuat subbahasan mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang 2017 (PPKI 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Substansi (Isi) Sistem Pendidikan Masa Kolonial Belanda di Indonesia

Semasa zaman kolonial, menurut catatan sejarah di Indonesia ini telah terdapat beragam sistem pendidikan, ada beberapa pendidikan pesantren tradisional yang mengajarkan pendidikan agama Islam, juga sistem persekolahan yang dibawa Belanda ke Indonesia. Budaya dan tradisi, serta pendidikan agama tradisional, terus memiliki pengaruhnya. Seorang anak yang menghadiri sekolah bahasa Belanda di pagi hari untuk pengajaran sekuler sering dikirim ke sekolah Islam pada sore hari untuk pengajaran agama. Sekolah pagi mengajarkan keterampilan anak yang memungkinkannya mencari nafkah sementara sekolah sore mengajarnya cara hidup. Furnivall (dalam Zainu'ddin, 1970: 19), dalam membuat perbedaan ini, menunjuk pada pembelahan yang tumbuh di antara kedua aspek ini. Instruksi Barat diimpor, dipisahkan dari tradisi budaya yang menjadikannya lebih dari sekadar instruksi atau sekedar pelatihan formal pikiran di negara asalnya. Itu tidak terkait dengan tradisi budaya masyarakat di mana orang Eropa mendirikan sekolah-sekolah dan kursus.

Sampai awal abad ke-20 sistem persekolahan belum banyak diminati di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha menata masyarakat penduduk pribumi untuk masuk dalam sistem pendidikan Barat (Salim dkk, 2007: 201). Pada abad ke-18 pendidikan dan pengajaran diberikan secara perse-orangan, padahal Capellen pernah mengajukan rencana program pendidikan pribumi kepada Gubernur Jenderal. Rencana yang menjanjikan ini untuk menyediakan bagi penduduk pribumi fasilitas pendidikan modern tidak diperbolehkan terwujud karena pemerintah kolonial tidak dapat menemukan keuangan yang diperlukan. Namun, rencana Capellen hanya berhasil melalui pendirian tiga sekolah pemerintah

untuk anak-anak pribumi di Pasuruan, Karawang, dan Cianjur (Penders, 1968: 9). Awal abad ke-19 sistem ini telah diubah oleh sistem pendidikan Barat yang modern. Sebelum pemerintah Belanda mendirikan sekolah di Jawa telah ada sekolah teologi yang khusus yang beragama Kristen.

Tetapi keadaannya tidak terpelihara. Sekolah-sekolah di Jawa yang didirikan sesudah 1850 agak teratur. Maksud pemerintah Belanda mendirikan sekolah tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat tetapi untuk melatih beberapa orang bagi dinas pemerintahan Belanda. Jadi, kesimpulannya bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran pada waktu itu hanya diarahkan kepada pendidikan pegawai bukan membentuk sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan aktif juga dianggap tidak bijaksana secara politis karena akan cenderung mengganggu produktivitas pribumi sehingga berdampak buruk pada produksi dan perdagangan pada tahun 1830-1870 (Penders, 1968: 11). Juga, upaya oleh beberapa pejabat kolonial yang lebih progresif untuk mendirikan sekolah bagi penduduk asli tidak berhasil karena tidak ada dukungan keuangan yang datang dari pemerintah kolonial (Brugmans, 1938: 89-92).

Ini diikuti oleh pembukaan sekolah pelatihan guru pertama untuk pribumi di Surakarta (1852) dan Fort de Kock (Bukittinggi) pada tahun 1856 yang (Brugmans, 1938: 183). Pada abad ke-19 didirikan sekolah kelas II (*ongko loro*) pengajaran di dalamnya lebih sederhana dari pada kelas I (*ongko siji*) yang mengembangkan *skill basic* antara lain: membaca, menulis, berhitung, dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia (Sutimin & Suparman, 2012: 22; Penders, 1968: 28). Juga tidak mudah untuk membenarkan upaya untuk mengurangi fasilitas pendidikan, terutama karena iklim pendapat internasional lebih menyukai penyebaran ide dan pendidikan dengan alasan moral dan sosial dan kekuatan kolonial mulai menilai satu sama lain dengan jumlah

pendidikan yang mereka berikan untuk rakyatnya. Pemerintah Hindia, juga prihatin untuk menyediakan tenaga kerja yang patuh dengan setidaknya sejumlah pelatihan, dan khususnya, pekerja klerikal murah untuk pangkat yang lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang luas, memperluas dan semakin kompleks, dan perkebunannya sendiri, dan perkebunan dan tambang dengan teknologi yang semakin modern (Rifa'i, 2011; Geschiere, 1973; Suratminto, 2013).

Pendirian sekolah merupakan prinsip dasar dari implementasi Politik Etis, sebab Politik Etis tampaknya menjadi kebijakan yang menarik ketika didengar, yang membuat simpati penduduk pribumi terhadap pemerintah kolonial dari konteks sosial-politik. Padahal kebijakan etis sebenarnya merupakan upaya yang dirumuskan oleh para sarjana Belanda dalam konteks kelanjutan eksploitasi kekayaan Indonesia, dengan demikian kebijakan etis ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial, yang *notabene* merupakan intensifikasi dan eksploitasi koloni. Munculnya itu bukan kebetulan, tetapi seiring dengan puncak imperialisme Barat sebagai manifestasi dari politik kapitalisme modern abad ke-19 oleh bangsa Eropa (Sumarno, Aji, & Hermawan, 2019: 370).

Pentingnya kelas berpendidikan yang dibutuhkan terkait dengan bangkitnya konjungtur internasional, perluasan dunia tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di pemerintahan, dibutuhkan bidang pengajaran untuk membawa pekerja ke tingkat yang lebih luas di tingkat lokal. Selain itu, upaya untuk memberikan pendidikan bagi penduduk pribumi sebagai upaya untuk melawan pendidikan dengan model Barat, untuk memerangi Pan-Islam yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial pasca Perang Diponegoro. Strategi ini merupakan bagian dari humanitarian untuk pekebun dan investor asing yang memerlukan efektivitas kegiatan produksi.

Tidak hanya edukasi, penyebaran irigasi membantu meningkatkan produksi gula dan tanaman ekspor yang dilakukan oleh pemukim Belanda/Eropa di tanah desa. Emigrasi penduduk desa Jawa mungkin kurang signifikan untuk bantuan yang diberikannya ke Jawa daripada untuk menyediakan tenaga kerja murah yang mengurangi kekurangan tenaga kerja di perkebunan Belanda di kepulauan lain luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perpanjangan pendidikan, jika dijaga dalam batas yang masuk akal, membantu menyediakan pegawai dan petugas medis (*medical orderlies*) untuk kalangan bawah pemerintah dan perusahaan bisnis.

Dalam konsepsi ini, yang menekankan pentingnya aspek budaya dan politik pendidikan, hampir tidak ada perhatian diberikan untuk fungsi sekolah dalam struktur ekonomi koloni juga hubungan antara pendidikan dan situasi ketenagakerjaan saat itu. Fakta bahwa pekerja terlatih mungkin tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok tidak dirasakan sebagai kesulitan, karena pekerja ini, yang lebih terbuka terhadap ide-ide revolusioner jika dihadapkan dengan pengangguran, akan memainkan peran aktif dalam membangun masyarakat baru yang akan memiliki permintaan yang lebih besar untuk angkatan kerja asli yang terlatih.

Pendidikan Barat dari pribumi pasti akan mengarah pada kemajuan populasi ini, bahkan jika untuk beberapa proses mungkin tampak lambat tak tertahankan hingga menjelang tahun 1942. Dan tentu saja tidak semua orang Belanda di Hindia Belanda menganggap ini sebagai tujuan utama mereka. Beberapa menganggap perkembangan seperti itu sama sekali tidak diinginkan, yang lain menginginkannya tidak terlalu penting dibandingkan dengan tujuan lain, seperti pelestarian perdamaian dan ketertiban demi pembangunan ekonomi Hindia Belanda dan banyak orang memperingatkan agar tidak tergesa-gesa memberikan pendidikan kepada mereka (Geschiere, 1973: 154).

Kebijakan di bidang pendidikan, pada akhirnya, membawa dampak kontraproduktif terhadap pemerintah kolonial Belanda karena dengan munculnya kelompok-kelompok terdidik di Indonesia ternyata menjadi faktor pendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok terdidik melahirkan kelompok-kelompok orang yang mampu memisahkan apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang melahirkan gerakan nasional Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang terpelajar. Menurut Sumarno, R.N. Bayu Aji, dan Eko Satriya Hermawan (2019: 371) adanya sekolah-sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan Barat menggugah rasa empati dengan melihat penderitaan para rakyat kecil dan meningkatnya kesadaran politik orang-orang terpelajar akhirnya membangkitkan harapan bahwa seorang elite Indonesia akan muncul untuk memimpin gerakan ini. Meskipun pendidikan pada awalnya diberikan sebagai asosiasi politik Belanda yang terintegrasi, untuk melawan pasukan anti Belanda itu dikawatirkan kelak menjadi penguasa tujuan politik di koloni tersebut.

Tentu saja ada beberapa permintaan untuk pribumi tertentu dengan pendidikan Barat karena pribumi kalangan bawah tidak mungkin bisa mengakses hal ini tanpa *network* dengan penguasa. Tetapi pasokan pekerja berpendidikan tidak boleh melebihi permintaan ini, dijelaskan P.L. Geschiere (1973: 154) karena ini akan menyebabkan pengangguran dan ketidakpuasan di antara mereka, sedangkan sekolah itu sendiri mungkin akan tumbuh menjadi lapisan panas agitasi nasionalistik dan anarkistik subversif. Secara karakteristik, kaum konservatif di kalangan bangsawan Jawa dan non Jawa memberi tekanan paling kuat pada hubungan antara pendidikan dan situasi pekerjaan dalam koloni saat itu. Minat mereka terpusat pada pengembalian ekonomi yang dapat diberikan pendidikan dan ketakutan akan orang Eropa terhadap pendidikan penduduk dapat menyebabkan kelebihan produksi, sisi yang

dilematis sekali. Tentu ini, kaum konservatif Jawa dan Eropa mendukung adaptasi atas nama kemajuan dan yang lainnya mendukung adaptasi dari sudut pandang yang lebih konservatif mengenai betapa pentingnya pendidikan bagi penduduk di Hindia Belanda.

Bahkan mereka yang siap menerima gagasan bahwa beberapa perluasan pendidikan diperlukan atas dasar ekonomi dan politik masih khawatir bahwa hal itu berpotensi berbahaya dalam menumbuhkan ketidakpuasan. Penguasa Eropa secara khusus curiga terhadap perluasan fasilitas pendidikan tinggi kepada penduduk pribumi, meskipun beberapa siap untuk memberikan beberapa konsesi kepada anggota aristokrasi (Zainu'ddin, 1970: 24). Sikap seperti itu dapat diparalelkan di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan berkembang ideologi sosialisme dan komunisme sehubungan dengan perluasan fasilitas pendidikan ke kelas pekerja atau penyediaan pendidikan tinggi untuk wanita.

Ada orang-orang yang lebih suka menutup mata, sejauh mungkin, pada kenyataan yang tidak menyenangkan bahwa kekuasaan mereka datang dari penguasa kolonial Belanda daripada dari hak mereka sendiri sebagai penguasa tradisional Jawa. Namun, yang lain bersedia berdamai dengan Belanda dan menerima fasilitas untuk studi pembelajaran Barat. Efek dari pendidikan seperti itu pada individu dapat menunjukkan perjuangan yang telah dihadapi banyak orang Indonesia yang dipaksa untuk mengatasi pembelajaran Barat dan mereka adalah budaya tradisional (Zainu'ddin, 1970: 29).

Sekolah-sekolah Anak Belanda dan Pribumi Masa Kolonial Belanda

Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang segera diikuti oleh pembukaan sekolah di kota-kota lain di Jawa. Jumlahnya meningkat dari 7 (tahun 1820), 19 (tahun 1835), 25 (tahun 1845), dan 57 (tahun 1857). Prinsip yang dijadikan pegangan tercantum di *Statuta* 1818 bahwa sekolah-sekolah harus dibuka “di tiap

tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan” atau secara lebih khusus, bila jumlah murid mencapai 20 di Jawa atau 15 di luar Jawa. Seorang inspektur pendidikan diangkat dan pada tahun 1830 telah terdapat sekolah di ke-banyakan kota (Penders, 1968: 1-29).

Pendirian sekolah dikarenakan sebagian besar beban ditanggung oleh pribumi yang pada akhir abad ke-19 membayar sekitar 80% dari total jumlah pajak yang dipungut selama masa *cultuurstelsel* maupun *Agrarische Wet* 1870 (Furnivall, 1944: 343). Selain itu, ada jenis ketimpangan regional yang khas. Tingkat melek huruf lebih tinggi di daerah luar Jawa daripada di daerah pusat (Jawa dan Batavia). Pada tahun 1930, penduduk pribumi laki-laki dan perempuan di kepulauan luar Indonesia kolonial berada pada 13,4% dan 4,0% masing-masing terhadap 9,7% dan 1,4% di Jawa. Menariknya, untuk tingkat minoritas Cina adalah sebaliknya, dengan 33,2% dan 7,7% di kepulauan luar dan 47,5% dan 16% di Jawa (Frankema, 2014: 4-5; Furnivall, 1943: 76).

Pada akhir abad ke-19 hampir tercapai taraf pendidikan universal bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia. Anak-anak yang tak mampu dapat dibebaskan dari pembayaran uang sekolah (Nasution, 2008: 9). Suatu sekolah menengah didirikan pada tahun 1860 yang membuka kesempatan bagi anak-anak Belanda untuk melanjutkan pelajarannya ke universitas di negeri Belanda, atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan. Suatu ciri yang khas dari pemerintah kolonial, yaitu fasilitas pendidikan yang bermutu tinggi senantiasa dipertahankan selama masa kolonial yang menjaga agar anak-anak Belanda/Eropa selalu mendapat pendidikan yang lebih baik daripada anak Indonesia.

Peserta didik *Europese Lagere School* (ELS) menerapkan sistem pendidikan bahwa semua anak orang Eropa dan mereka yang secara legal dipersamakan dengan orang Eropa berhak untuk memasuki dan menjadi

peserta didik *Europese Lagere School* (ELS). Peserta didik di tingkat *Hogere Burger School* (HBS) dimaksud bagi murid-murid Belanda dan golongan atas yang sanggup menyekolahkan anaknya ke ELS kelas satu, yang mengajarkan bahasa Perancis sebagai syarat masuk HBS di samping ujian masuk (Nasution, 2008: 134). Peserta didik menurut jenis kelamin pada mulanya HBS tidak menerima peserta didik wanita, dikarenakan banyak tentangan mengenai koedukasi bagi wanita/perempuan. Selain itu masih terdapat anggapan bahwa penerimaan peserta didik wanita akan menimbulkan persoalan, sehingga menuai pro dan kontra. Namun pada tahun 1891 akhirnya terdapat perubahan, yaitu gadis-gadis diperbolehkan dan diterima untuk menjadi peserta didik di HBS (Nasution, 2008: 134). *Europese Lagere School* (ELS) pertama didirikan pada tahun 1817 di Batavia (Jakarta). Sekolah serupa ini boleh didirikan di tiap tempat asal jumlah muridnya mencapai 20 di Jawa dan 15 di luar Jawa. Pada tahun 1920 jumlah ELS telah meningkat menjadi 196 buah (Penders, 1968: 26-27).

Sejak pertengahan abad ke-19 kebanyakan orang Belanda telah menyekolahkan anaknya dan tak lama kemudian telah tercapai pendidikan universal bagi penduduk berkebangsaan Belanda/Eropa. Ini hanya mungkin dengan usaha dan dukungan penuh dari pemerintah, dengan membuat ijazah ELS syarat untuk jabatan pemerintah, dan mendatangkan guru secukupnya dari negeri Belanda. Sekolah ini yang semula di-maksud untuk anak-anak miskin mula-mula bermutu rendah karena guru yang kurang berwenang dan latar belakang murid yang kurang baik.

Orang tua yang mapan dan kaya, yang tidak menginginkan anaknya bercampur dengan anak-anak golongan rendah. Mereka lebih suka mengirim anaknya ke negeri Belanda atau sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda. Maka dirasakan

perlunya sekolah khusus untuk anak-anak dari golongan tinggi dan pada tahun 1833 didirikan *Eerste Europese Lagere School* (ELS Pertama) yang memungut uang sekolah cukup tinggi yakni f. 6 sebulan (Penders, 1968: 27).

Mereka yang tidak sanggup harus memasuki ELS bukan pertama, ELS pertama, yang menyajikan pendidikan yang lebih tinggi mutunya, tidak menerima anak-anak pribumi sekalipun anak ningrat tinggi dari bangsawan Jawa maupun bangsawan non Jawa. ELS menentukan pola sekolah rendah 7 tahun, yang kemudian diikuti HCS dan HIS, sehingga sekolah-sekolah khusus untuk pribumi seperti *Volksschool* dan *Vervolgschool* senantiasa dalam keadaan tidak lengkap dan dengan demikian tidak memperoleh kesempatan untuk kelanjutan pelajaran ke sekolah menengah berbahasa Indonesia dan Melayu (Suratmino, 2013: 80). Bagi anak pribumi, sekolah yang bercorak Barat tak mungkin menjadi sekolah umum bagi seluruh rakyat, karena akan menjauhkan anak dari kebudayaannya. Lagi pula mempelajari bahasa Belanda sukar dan menelan waktu banyak (Penders, 1968; Frankema, 2014).

Kesadaran tidak menguasai bahasa Belanda dengan baik sepenuhnya senantiasa mencekam orang Indonesia dengan rasa inferioritas Timur dalam menghadapi orang Belanda yang pada umumnya menuntut pembelajaran yang sederajat. Kurikulum ELS yang sebagian besar ditetapkan di Belanda tak mungkin relevan dengan pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia mengenai tenaga terampil. Namun ELS tetap dipertahankan pemerintah Hindia Belanda demi kepentingan segelintir anak yang mungkin kembali ke tanah airnya. *Hogere Burger School* (HBS) perlunya sekolah menengah di Hindia Belanda sehingga anak-anak pribumi tidak perlu lagi pergi ke Belanda (Suratminto, 2013: 79). Pada tahun 1848 tokoh-tokoh di Indonesia mengadakan rapat di Batavia untuk mengajukan permohonan kepada raja Belanda agar didirikan sekolah menengah. Tujuan sekolah ini untuk mempersiapkan

siswa masuk ke universitas dan untuk jabatan yang tidak memerlukan *diploma universiter*.

Pada tahun 1867 didirikan HBS pertama di Jakarta, 1875 di Surabaya, 1877 di Semarang. HBS Surabaya dan Semarang yang sedianya lamanya 3 tahun menjadi 5 tahun pada tahun 1879. Pada tahun 1882 didirikan HBS dengan jenjang tempuh studi 3 tahun untuk anak wanita di Batavia. Kurikulum HBS di Hindia Belanda tak sedikit pun berbeda dengan yang di negeri Belanda. Kurikulum ini dirasa mantap tanpa banyak mengalami perubahan selama eksistensinya mengajarkan pengetahuan Barat dan pembelajaran *teacher sentris* dan dapat bertahan terhadap berbagai kritik dari berbagai pihak. *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) tahun 1903 adalah tahun pendirian kursus MULO yang disambut baik oleh kaum Indo-Eropa dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke HBS yang dianggap mahal. MULO juga dianggap dapat memungkinkan lulusannya bekerja di kantor pemerintahan (Sukardjo & Komarudin, 2009: 127).

Pada tahun 1914, kursus MULO diubah menjadi sekolah MULO. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan yang berorientasi ke Barat dan tidak mencari penyesuaian dengan Hindia Barat. Kalangan tertentu menginginkan MULO dikhususkan bagi anak-anak Belanda, akan tetapi diputuskan agar MULO menjadi lembaga pendidikan untuk semua kalangan. Sekolah Pertukangan (*Ambachtschool*) merupakan sekolah kejuruan/sekolah vokasi pertama di Hindia Belanda. Sekolah ini diusahakan oleh swasta yang sejak tahun 1870 telah menanamkan investasi saat UU Agraria 1870, dan dibuka di Batavia. Sekolah Teologi Kristen yang lebih bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan ini bertujuan untuk membantu golongan peranakan Indo-Eropa agar dapat mencari penghidupan yang layak. Sekolah pertukangan pertama yang diusahakan oleh pemerintah dibuka pada tahun 1860 di Surabaya. Sekolah ini diperuntukkan bagi

golongan Eropa (Sukardjo & Komarudin, 2009: 128).

Berkembangnya ide feminisme di Eropa, mendesak diadakan pendidikan bagi kalangan wanita di Hindia Belanda. Ide-ide liberal yang diterapkan bagi anak-anak Belanda dengan menyediakan fasilitas pendidikan secukupnya, tidak dilakukan bagi anak-anak pribumi. Karena pemerintah hanya bertanggung jawab membuat peraturan tanpa kewajiban menyediakan sekolah. Pendidikan bagi anak Indonesia tidak diabaikan sepenuhnya. Daendels dan Van Der Capellen menganjurkan pendidikan rakyat. Tetapi tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan, hanya 3 sekolah awal yang didirikan sebagai respon pemerintah kolonial. Awal abad 18, pemerintah tak menyediakan satu sekolahpun bagi anak pribumi. Agar menghormati pribumi serta lembaga-lembaga adat mereka dan alasan finansial akibat Perang Diponegoro 1830 yang turut menghambat pendirian sekolah-sekolah ke seluruh daerah di Hindia Belanda. Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda menggunakan kerja paksa rodi untuk memperoleh keuntungan maksimal selama masa *cultuurstelsel* (Penders, 1968: 14).

Sistem ini membuka kesempatan berbagai penyalahgunaan yang melampaui batas kemanusiaan. Tetapi kekejaman ini menimbulkan keuntungan besar yaitu memperkerjakan orang bumiputera untuk menjaga perkebunan, pemerintah sedapatnya harus memberi pendidikan. Tahun 1848, pertama kalinya diberikan sejumlah f. 25.000 untuk pendirian sekolah bagi anak bumiputera/ pribumi (Zainu'ddin, 1970: 22; Suratminto, 2013: 78). Saat itu, pemerintahan dipegang oleh kaum liberal yang mempunyai pendidikan yang lebih luas. Walter Robert Baron van Hoevell yang datang ke Hindia Belanda, berbuat banyak untuk menarik perhatian rakyat Belanda pada keadaan yang menyedihkan di Hindia Belanda.

Tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan dan digantikan Undang-Undang

Agraria 1870 yang memungkinkan pihak swasta menyewa tanah selama 75 tahun kepada pemerintah Hindia Belanda (Kartodirdjo, 2014b). Tahun 1852, Sekolah Pendidikan Guru dibuka pertama kali dan didirikan pula Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri yang mengurus kegiatan pendidikan nasional kolonial di Hindia Belanda (Zainu'ddin, 1970: 23; Suratminto, 2013: 78). Setelah 1870, ekonomi memburuk, membuat Belanda memotong gaji guru dan timbul kecenderungan untuk menyerahkan pendidikan ke swasta untuk meringankan beban finansial. Mensubsidi sekolah dianggap lebih murah daripada memelihara sekolah pemerintah. Krisis gula tahun 1885 menimbulkan kerugian. Pengeluaran dibatasi, biaya pendidikan dikurangi, sejumlah sekolah guru harus ditutup dan perluasan sekolah rendah segera dihentikan. Groenevelt menganjurkan 2 jenis sekolah, yaitu sebagai berikut. 1). Sekolah Kelas Satu untuk anak golongan atas yang akan menjadi pegawai, 2). Sekolah Kelas Dua untuk penduduk pribumi dari golongan menengah dan bawah, selebihnya kurikulum sekolah ditentukan pemerintah pusat. Berdasarkan keputusan raja tanggal 28 September 1892, termuat dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) nomor 125 tahun 1893, terjadi reorganisasi pada kebijakan pendidikan dasar sebagai berikut. Sekolah dasar bumiputera dibedakan menjadi:

- a. Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste School*) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak para pemuka, tokoh terkemuka, dan orang-orang terhormat bumiputera.
- b. Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) adalah sekolah bagi anak-anak bumiputera/pribumi pada umumnya, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat biasa pada umumnya (Gunawan, 1985: 13; Jusuf, 2012: 20). Sekolah Dasar Kelas Satu itu kemudian menjadi ELS, untuk anak-anak orang Belanda di Indonesia dan anak bangsawan; HIS (*Hollandsch Inlandsche*

School), untuk anak-anak tokoh bumiputera, anak-anak pegawai negeri (*ambtenaar*) yang bergaji sekurang-kurangnya f. 75 sebulan atau bertitle Raden (Gunawan, 1985:16; Suratminto, 2013: 80). Sekolah Kelas Satu, sebagaimana peraturan dalam 1893 terdiri atas matapelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf daerah dan Latin, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, berhitung, geografi, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, menggambar, dan mengukur tanah (Suratminto, 2013: 79). Sekolah kelas satu tidak populer di kalangan priyayi karena tidak memberikan bahasa Belanda dan tidak membuka kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan. ELS masih satu-satunya lembaga bagi mereka yang menginginkan sekolah lanjutan, setelah diperlunak, bertambah banyaklah peminat. Untuk meringankan beban ELS, bahasa Belanda dimasukkan di Sekolah Kelas Satu. Namun tidak seperti yang diharapkan karena masih adanya diskriminasi terhadap anak-anak bumiputera/pribumi kalangan bawah dan menengah.

Sekolah Kelas Dua. Sekolah Kelas Dua tidak berkembang menjadi sekolah umum bagi seluruh rakyat. Karena diperluasnya program dan sekolah ini menjadi sama dengan sekolah kelas satu, pemerintah tidak dapat memikul akibat finansial dan bila terbentuk sejumlah manusia yang menjauhkan diri dari kehidupan desa dan kasar dengan menginginkan pekerjaan kantor. Tahun 1907, Gubernur Jendral Van Heutz “menemukan kembali” Sekolah Desa, yang memberikan pendidikan besar-besaran dengan biaya sekecil-kecilnya.

- c. Sekolah Desa. Sekolah Desa adalah perwujudan hasrat pemerintah untuk menyebarkan pendidikan seluas mungkin dengan biaya serendah mungkin di kalangan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk menjamin keberhasilannya pemerintah harus

memberikan bantuan keuangan. Sekolah desa ternyata dapat berkembang menurut ukuran yang tak kunjung tercapai oleh tipe sekolah lain selama penjajahan Belanda di Indonesia. Sekolah desa menjadi usaha pendidikan terbesar yang pernah dijalankan oleh Belanda untuk memberi kesempatan kepada masyarakat banyak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kurikulum ditentukan dan dikuasai oleh pemerintah yang menginginkan kurikulum yang sesederhana mungkin berbasis sosioekonomi perdesaan sehingga lulusannya tak mampu melakukan pekerjaan administrasi di kantor dan karena itu tidak akan meninggalkan desanya untuk bekerja di kota.

Maka tujuan utama sekolah ini adalah memberantas buta huruf. Tujuan ini pun tidak tercapai karena jumlah kelahiran senantiasa melebihi jumlah kelulusan tenaga terampil dan ahli. Agar dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk maka tiap tahun diperlukan penambahan sekolah sebanyak 500-900 buah. Kurikulum sekolah ini ternyata tidak memadai bagi kebanyakan anak yang makin lama makin banyak memasuki sekolah kelas dua untuk menyambung pelajaran, sehingga akhirnya Sekolah Desa menjadi substruktur bagi Sekolah Sambungan (Sekolah Standar) yang sama dengan kedua kelas terakhir Sekolah Kelas Dua. Sekolah desa sering dikecam karena kurikulumnya yang sederhana dan mutu guru dan pendidikannya yang buruk. Namun sekolah ini juga mengandung keuntungan dalam dan menulis menjadi sesuatu yang langka.

Maka tahun 1915 diciptakan sebuah "sekolah sambungan" bagi sekolah desa untuk dapat sekolah yang lebih tinggi, yaitu *Vervolgschool*, yang mempunyai masa pendidikan 2 tahun: kelas 4 dan kelas 5 (Moehadi dkk, 1997: 53). Sekolah desa membawa pendidikan formal sampai ke tiap desa kecil dan terpencil dan menjadi

badan penyebar buah pikiran dan pengetahuan Barat, mendorong rayat agar menjadi lebih sadar akan pendidikan sekolah dan meletakkan dasar untuk pendidikan universal. Menurut I.J. Brugmans (1938) berfungsi sebagai alternatif murah dan dasar untuk menjangkau penduduk pribumi mengenyam pendidikan Barat. Untuk melanjutkan pendidikan menengah dari Sekolah Desa yaitu *Vervolgsschool*, yang masih merupakan bagian dari Sekolah Desa dengan jenjang pendidikan menengah bagi masyarakat perdesaan (Suratminto, 2013:80).

Ailsa Zainu'ddin (1970:26) menganalisis sekolah-sekolah desa memainkan sedikit atau tidak sama sekali peran dalam transmisi budaya dan dalam sosialisasi politik anak-anak desa. Nilai-nilai tradisional desa ditransmisikan baik melalui keluarga, melalui kegiatan sehari-hari di desa, atau melalui sarana tradisional seperti pementasan wayang. Namun sudah jelas bahwa, bahkan untuk program tiga tahun minimal di desa-desa, pengeluaran yang jauh lebih besar akan diperlukan. Rencana untuk menghubungkan sekolah-sekolah bahasa daerah dengan instruksi teknis ditolak karena terlalu mahal. Salah satu tujuan dari pendidikan yang diperluas adalah untuk mendorong kemandirian, dan seberapa baik hal ini dapat dicapai daripada dengan membuat penduduk desa menyediakan gedung sekolah sendiri dan membiayainya? Ailsa (1970:25) menjelaskan dari tahun 1907, pendidikan bahasa daerah ditempatkan di lingkungan desa, untuk dibiayai secara lokal dan komunal. Penduduk desa menunjukkan keengganan yang cukup besar dalam menyediakan dana untuk bangunan asli dan murid untuk sekolah karena keterbatasan biaya dan tempat untuk menyediakan bangunan sebagai sekolah desa.

- d. *Hollands Inlandsche School* (HIS). Alasan prinsip bagi pendirian HIS adalah keinginan yang kian menguat di kalangan orang pribumi untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat. Keinginan itu adalah konsekuensi yang wajar dari perubahan sosial politik di Timur Jauh. Kurikulum HIS seperti tercantum dalam *Statuta* 1914 No. 764 meliputi semua mata pelajaran ELS, bahkan lebih kaya dengan adanya matapelajaran menulis bahasa Melayu dan Arab, secara fleksibel. Kurikulum HIS seperti halnya ELS tidak banyak mengalami perubahan. Kurikulum ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat Hindia Belanda akan tetapi berorientasi pada *Netherlands sentris*.
- e. *Algemene Middelbare School* (AMS). Pendirian MULO sebagai lanjutan segala macam sekolah rendah yang berorientasi Barat, khususnya HIS merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan suatu sistem pendidikan yang lengkap di Indonesia. Langkah berikutnya dibukanya AMS. Sekolah menengah ini merupakan superstruktur MULO yang terbagi atas bagian A yang mengutamakan sastra dan sejarah dan bagian B yang mengutamakan matematika dan fisika. Bagian A dibagi lagi menjadi A1 untuk Studi Klasik Timur dan bagian A2 untuk Studi Klasik Barat.
- f. Sekolah Raja (*Hoofdschool*). Sejalan dengan kebutuhan pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga terdidik dari golongan bangsawan pribumi yang akan dilibatkan dalam pekerjaan administrasi pemerintahan-nya, maka didirikan Sekolah Raja di Tondano pada tahun 1865 dan 1875. Sekolah itu kemudian didirikan juga di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1875. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan Belanda. Setelah mengalami percobaan dan perubahan pada tahun 1900, Sekolah Raja diberi nama OSVIA (*Opleiding School voor Indische Ambtenaren* atau Sekolah

untuk Pendidikan Pribumi) (lihat gambar 1). Sekolah ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi sekolah menengah yang disebut MOSVIA (*Middelbaar Opleiding School voor Indische Ambtenaren*). Sekolah ini berfungsi untuk mendidik para kandidat pejabat pemerintah dan studi membutuhkan waktu 5 tahun untuk diselesaikan (Suratminto, 2013: 79).

Gagasan kesejahteraan, reformasi moral, dan kemandirian yang dicapai melalui pendidikan terkandung dalam kerangka paternalistik, tetapi mereka mengarah pada gerakan untuk memperluas fasilitas pendidikan di luar lingkaran aristokrasi, dan pada tahun 1892 sekolah-sekolah untuk orang Jawa dibagi menjadi lima. Sekolah kelas satu untuk anak-anak aristokrasi, didirikan di tingkat kabupaten dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan sekolah kelas dua tiga tahun untuk seluruh penduduk, didirikan di tingkat desa dengan pengajaran dalam bahasa setempat.

Dalam pendidikan pascasarjana, setara dengan ujian akhir "*hoofden scholen*" bagian A dan B serta mereka yang belajar di sekolah-sekolah Belanda sampai kelas dua sudah diklasifikasikan sebagai priyayi. Sementara di bidang pendudukan tingkat ulama di kantor pejabat Eropa dan Jawa dan di pemerintahan domestik serta panitera (*clerks*) di berbagai lembaga hingga tingkat kecamatan dan mandor kuli pribumi, sipir dan "opas" di kantor kontrol juga termasuk dalam kelompok priyayi (Sumarno, Aji, & Hermawan, 2019: 371). Kemudian pada tahun 1878 sekolah empat tahun dirancang khusus, untuk putra priyayi-*hoofdenscholen* didirikan di Bandung (Jawa Barat), Magelang (Jawa Tengah), Probolinggo (Jawa Timur), dan Tondano (Sulawesi) (Penders, 1968: 22).



Sumber: *Collectie Tropenmuseum*

Gambar 1. *Opleiding School voor Indische Ambtenaren (OSVIA)*

- g. Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*). Sekolah Pendidikan Guru di Hindia Belanda mula-mula diselenggarakan oleh *zending* di Ambon pada tahun 1834. Sekolah ini berlangsung sampai 30 tahun (1864) dan dapat memenuhi kebutuhan guru pribumi bagi sekolah-sekolah yang ada waktu itu. Sekolah seperti itu diselenggarakan oleh *zending* di Minahasa pada tahun 1852 dan 1855 di buka satu lagi di Tanahwangko (Minahasa). Bahasa pengantar yang digunakan sekolah di Ambon dan Minahasa adalah bahasa Melayu. Peraturan-peraturan ini menekankan bahwa, pertama-tama, perhatian harus diberikan untuk melatih guru-guru Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya antara 1873 dan 1879 enam sekolah pelatihan guru baru didirikan. Durasi kursus pelatihan adalah empat tahun (Penders, 1968: 23).

Ketidakseimbangan antara persediaan tempat belajar dengan permintaan atau kebutuhan masuk sekolah dapat diatasi dengan pendirian sekolah-sekolah swasta antara lain yang dibuka oleh *zending*, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain-lain terhadap sekolah-sekolah tersebut diadakan pengawasan ketat serta diadakan peng-golongan berdasarkan persyaratan tertentu. Ada sekolah subsidi yang memperoleh bantuan, sekolah dipersamakan (*gelijkgesteld*) dan sekolah liar (*wilde school*). Sekolah-sekolah tersebut memiliki

keleluasaan dalam menerima murid yaitu tidak terlalu ketat dalam menerapkan kriteria yang terbuka untuk mobilitas vertikal golongan pribumi. Sekolah-sekolah liar dikenakan *wilde scholen ordonantie* (Kartodirdjo, 2014b).

Memperhatikan pertumbuhan sekolah-sekolah pribumi yang oleh pemerintah Hindia Belanda sebut *wilde scholen* atau *wild school*, pemerintah khawatir ketika mereka menyadari bahwa jika seluruh rakyat jelata dalam jumlah besar memiliki dan menempuh pendidikan tinggi, mereka tidak akan berkeinginan menjadi pekerja kasar (Suratminto, 2013:82). Sekolah-sekolah liar tahun 1930-1942 maupun yang sudah ada menjadi pelopor semangat nasionalisme tumbuh lebih bersemangat di Hindia Belanda. Itu adalah titik awal pertumbuhan pahlawan nasional yang kemudian berbagi kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk mengusir kolonialisme Belanda.

Ordonansi sekolah liar tahun 1932 menetapkan bahwa semua guru yang bekerja di sekolah yang tidak dikenal harus mendaftarkan diri mereka ke pihak berwenang setempat dan menjalani pemeriksaan kualitas oleh perwakilan resmi negara (Frankema, 2014:14). Protes menentang peraturan itu sangat sengit, dan pemerintah harus mencabut undang-undang itu hanya beberapa bulan kemudian. Petrus Johannes Idenburg dalam fungsinya sebagai Direktur Pendidikan mengusulkan perubahan drastis dalam sistem pendidikan sekolah, termasuk penghapusan prinsip kesesuaian dan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan elit dan nasional. Namun, mustahil untuk menilai apakah ini benar-benar awal dari kebijakan pendidikan yang sepenuhnya baru sejak pemerintahan Belanda di Hindia segera setelah itu berakhir (Geschiere, 1973: 171).

Sekolah-sekolah Orang Cina Perantauan dan Sistem Penilaian dalam Pembelajaran di Sekolah-sekolah di Masa Kolonial Belanda

Menjelang akhir abad ke-19, sejumlah orang Cina peranakan yang berpendidikan Belanda membenci diskriminasi sosial pemerintah kolonial melalui pasal 131 dan 163 *Indiesche Staatsregeling* (IS) terhadap anak-anak keturunan Cina. Maka, pada tanggal 17 Maret 1900, orang Cina peranakan yang di pimpin Khoe Siau Eng mendirikan perkumpulan Tjong Hoa Hwe Koan (THHK) guna memajukan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Cina peranakan di Hindia Belanda (Jusuf, 2012: 26). Menurut Iskandar Jusuf (2012: 84), pendirian THHK ini bertujuan selain memberikan pengajaran ajaran Konfusius juga mengubah kebiasaan (*habit*) pemborosan uang untuk pesta perkawinan dan kematian. Pada saat yang sama, orang Cina peranakan yang berpendidikan Barat dan membenci kebijakan Belanda, sama-sama kritis terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat mereka sendiri, terutama praktik pernikahan dan pemakaman yang mereka rasa takhayul dan sangat mahal (Suryadinata, 1972: 53).

Pada tanggal 25 April 1905, Dewan Hindia menunjukkan kekhawatirannya dengan memberi nasehat kepada pemerintah untuk mendirikan juga sekolah bagi orang Cina dengan sistem pendidikan Barat. Namun, usulan tersebut ditolak. Barulah tanggal 28 Juni 1907, Dewan Hindia mengusulkan pendirian sekolah-sekolah Belanda untuk anak-anak keturunan Cina di Hindia Belanda (Jusuf, 2012: 87). Usulan tersebut disetujui guna mencegah bangkitnya nasio-nalisme orang-orang Cina di Hindia Belanda dan memiliki hubungan politik dengan orang Cina totok di dataran Cina. Adapun bahasa Cina diberikan di kelas malam dengan guru khusus akan bertanggung jawab atas kelas-kelas ini yang akan mencakup kursus tentang budaya, sastra, dan bahasa Cina (Suryadinata, 1972: 58).

Jika memang harus disebutkan layanan pendidikan khusus untuk orang-orang Cina bisa dikatakan hanyalah satu sekolah, yakni *Hollandsch Chineesche School* (HCS). HCS pertama kali berdiri di Batavia kemudian menyebar di Jawa dan Sumatera termasuk di Garut (lihat gambar 2). Jika ditelusuri lebih lanjut berdirinya HCS bukan karena inisiatif pemerintah tetapi karena desakan dari pihak warga Cina yang menginginkan pendidikan yang merata dan lebih baik. Pendirian HCS menunjukkan dengan jelas bagaimana sekolah digunakan sebagai alat politik untuk mencegah orang Cina menjadi tak loyal terhadap pemerintah Belanda. Sikap acuh tak acuh akan pendidikan anak-anak Cina tiba-tiba berubah menjadi minat yang besar akan pendidikan, mereka di paksa oleh perubahan konstelasi politik di timur jauh. Rasa takut akan kehilangan loyalitas orang Cina mendorong Belanda untuk menawarkan kesempatan belajar yang paling baik yang ada, yakni HCS yang membuka kesempatan untuk memasuki MULO maupun HBS. HCS mempunyai dasar yang sama dengan ELS. Bahasa Perancis biasanya diajarkan pada sore hari seperti halnya dengan bahasa Inggris, yang sebenarnya tidak di berikan pada ELS, namun diajarkan berhubung dengan kepentingan bagi perdagangan dan administrasi publik (Frankema, 2014: 6).



De Hollands-Chineesche School te Garut. Foto genomen bij gelegenheid van de visitatie van de algemeen overste, zr. Emmanuel Lemmens. Zij zit in het groepje zusters onderaan in het midden (Java, 1939). Foto: Archief Zusters Onder de Bogen, Maastricht.

Sumber: Archief Zusters Onder de Bogen, Maastricht

Gambar 2. *Hollandsch Chineesche School* di Garut, Jawa Barat.

Akhirnya, ada kesenjangan yang cukup besar dalam pendaftaran etnis dan tingkat melek huruf. Tentu saja, sebagian besar anak-anak Belanda dan sebagian besar anak-anak Indo-Eropa terdaftar di sekolah-sekolah Eropa, di mana mereka diajarkan kurikulum sekolah dasar Belanda standar. Tetapi ada juga kesenjangan yang cukup besar antara Cina dan Indonesia. Kesenjangan ini terlihat jauh lebih jelas dalam tingkat melek huruf daripada dalam tingkat pendaftaran sekolah yang tercatat secara resmi (Frankema, 2014: 5). Ini mungkin menunjuk pada peran penting untuk pendidikan rumah di kalangan orang Cina, yang akan sesuai dengan kenyataan bahwa orang Cina adalah yang pertama memberikan tekanan pada otoritas kolonial untuk mendukung perluasan sekolah-sekolah Cina ke seluruh daerah seperti di Kota Malang, Yogyakarta, Singkawang, Makassar, Pasuruan, dan lain-lain.

Selain itu juga terdapat HCS bersubsidi, didirikan pada tahun 1924 dengan nama *Christelijk Hollands Chineesche School* di Niuwe Kerkstraat (sekarang Bubutan Koblen) di Kota Surabaya. Kapasitas sekolah tersebut terdiri 119 murid dan 5 guru. Pada tahun 1926 membuka sekolah khusus untuk anak wanita Tionghoa dengan nama *Hollandsch Chineesche Meisje School* di Cannalaan (sekarang Jalan Kanal) Kota Surabaya mempunyai 121 murid dan 5 guru. Kurikulum yang diajarkan sama dengan kurikulum ELS yaitu menulis, membaca, berhitung, Bahasa Belanda, sejarah, dan ilmu bumi, namun ditambah pelajaran kete-rampilan untuk murid-murid perempuan yaitu *Bijbel* dan sejarah Inggris (Prayudi & Salindri, 2015: 25).

Penilaian pada masa kolonial hampir mirip seperti sekarang ini. Walaupun instrumennya belum beragam seperti saat ini. Angka yang digunakan untuk apresiasi hasil yang diperoleh adalah dari 0-10. Instrumen tes tetap merupakan alat evaluasi yang utama. Dapat dikatakan hanya pemberian tugas yang merupakan alat evaluasi tambahan. Memang keadaan ini pun tidak berbeda dengan prinsip

dengan alat evaluasi yang digunakan guru sekarang. Walaupun demikian guru belum mengenal bentuk tes obyektif. Bentuk soal yang digunakan masih berupa uraian (esai). Bentuk ini digunakan sampai pasca Indonesia merdeka dan terus digunakan tanpa ada perubahan dalam bentuk sampai nantinya digunakan bentuk tes obyektif.

Pendidikan kolonial untuk golongan bangsawan serta penguasa tidak diragukan lagi mutunya. Para pemimpin nasional diberi kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah kolonial bahkan beberapa mahasiswa yang dapat melanjutkan ke universitas terkenal di Eropa. Dalam sejarah pendidikan Indonesia dapat dikatakan bahwa intelegensi bangsa Indonesia tidak kalah dengan orang Eropa, Timur Asing, dan Indo-Eropa. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kekurangan kesempatan yang sama yang diberikan kepada semua anak bangsa.

Sistem pendidikan masa kolonial Belanda merumuskan bagaimana mengintegrasikan pendidikan bagi pribumi ke dalam sistem pendidikan Eropa yang ada, lebih maju, tetapi juga agak mahal yang telah dirancang untuk anak-anak elit Belanda, Cina, dan pribumi. Sampai akhir abad ke-19, pendidikan populer (*volksonderwijs*) telah ditinggalkan hampir seluruhnya ke pasar swasta. Salah satu masalah utama adalah apakah sekolah Islam pribumi dan sekolah misionaris Kristen harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan umum yang humanis (Frankema, 2014: 5). Karena, pemerintah Hindia Belanda berupaya mengamankan netralitas dalam urusan agama, yaitu mengejar prinsip laisisme (kebijakan tidak berdasar pada agama dan agama merupakan urusan masing-masing tiap individu) meskipun diizinkan berdiri sekolah berbasis agama.

Walaupun pendidikan sebelum kemerdekaan begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, alhasil bangsa ini dididik untuk

mengabdikan kepada penjajah atau setelah pasca kemerdekaan adalah untuk kepentingan para penguasa pada saat itu dalam menggaungkan nasionalisme dan persatuan di dalam menemukan jati diri pendidikan nasional. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pendidikan di zaman kolonial Belanda adalah pendidikan yang menjadikan penduduk Indonesia bertekuk lutut di bawah ketiak kolonialis.

Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi. Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutakan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang sedemikian mungkin mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiaikan manusia sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri.

Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan anak muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat di transfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintah kolonial (Kartono, 1997: 49-50). Selain itu, agar penduduk pribumi menjadi pengikut negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan mudah ditundukkan serta dieksploitasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.

KESIMPULAN

Dari pernyataan diatas kita tahu bahwa pendidikan zaman kolonial Belanda sangat mengutamakan pendidikan yang cukup tinggi

bagi anak-anak Belanda. Tidak semua rakyat Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak Belanda mungkin hanya ada beberapa diantaranya adalah seorang bangsawan dan orang kaya saja karena sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda adalah sekolah mahal dan banyak yang tidak mau jika anak-anak Belanda harus berbaur dengan anak pribumi yang *notabene*nya miskin dan tidak berpengetahuan luas.

Bahkan orang tua yang tidak ingin anak-anaknya berbaur dengan pribumi mengirimkan anak-anak mereka ke negeri Belanda. Namun, Pendidikan bagi anak Indonesia tidak diabaikan sepenuhnya. Daendels dan Van Der Capellen menganjurkan pendidikan rakyat Indonesia walaupun tidak sepenuhnya berhasil hanya 3 sekolah didirikan. Karena mendirikan sekolah merugikan Belanda lagipula saat itu Belanda kekurangan dalam finansial. Maka Belanda menyerahkan sekolah untuk dikelola swasta. Karena kebutuhan Belanda akan tenaga terdidik semakin mendesak, maka berkembanglah sekolah-sekolah lain seperti sekolah desa, HIS, dan sekolah raja, meskipun tidak semua dari pribumi kalangan bawah dan menengah bisa menikmati bangku sekolah.

Dari segi penilaian yang digunakan pada zaman kolonial hampir sama dengan saat ini meskipun dalam instrumennya belum beragam, tapi penilaian menggunakan angka 0-10 sama seperti saat ini. Setidaknya berkat adanya sekolah-sekolah tersebut banyak bermunculan tokoh-tokoh pahlawan yang terdidik (cendekiawan), seperti Ki Hadjar Dewantara, Soekarno, M. Hatta, Sutan Sjahrir, dr. Radjiman Wediodiningrat, dr. Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Pendidikan kolonial untuk bangsawan pribumi juga tidak diragukan lagi bahkan banyak diantaranya yang melanjutkan ke universitas terkenal di Eropa. Mereka tentu saja dipimpin oleh prinsip-prinsip non-asimilasi, tetapi konsep-konsep mereka tidak banyak berpengaruh langsung pada kebijakan pemerintah kolonial

Belanda. Memang saat zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya dipusatkan untuk membantu dan semuanya untuk kepentingan penjajah terutama dalam pemenuhan kebutuhan tenaga ahli dan terampil. Namun, dalam sejarah pendidikan dapat dikatakan bahwa intelegensi bangsa Indonesia tidak kalah dengan penjajah karena banyak bermunculan tokoh-tokoh bangsa yang berpendidikan Barat membentuk organisasi sosiopolitik dan budaya modern dengan strategi kooperatif maupun nonkooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Brugmans, I.J. 1938. *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*. Groningen: Wolters.
- Frankema, Ewout H.P. 2014. *Why was the Dutch legacy so poor? Educational Development in the Netherlands Indies, 1871-1942*. CGEH Working Paper Series No. 54. Utrecht, Netherlands: Centre for Global Economic History Universiteit Utrecht.
- Furnivall, John Sydenham. 1943. *Educational Progress in Southeast Asia*. New York: Institute of Pacific Relations.
- Furnivall, John Sydenham. 1944. *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gunawan, Ary H. 1985. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Geschiere, P.L. 1973. The Education Issue in the Dutch East Indies in the Twen-tieth Century Opinions on the Question of "Western Education" versus "National Education" in W. Brulez, A.C.F. Koch, E.H. Kossman, F.C. Spits, Joh. de Vries, P. L. Geschiere, Alice. C. Carter, & J. Dhondt. 1973. *Acta Historiae Neerlandicae/Studies on the History of the Netherlands VI* (pp. 146-174). The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff.
- Jusuf, Iskandar. 2012. *Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai Sekolah Terpadu Paha 2008*. Tangerang Selatan: Sekolah Terpadu Paha.

- Kartodirdjo, Sartono. 2014b. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1900-1942: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Yogyakarta: Ombak.
- Kartono, Kartini. 1997. *Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moehadi dkk. 1997. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Nasution, S. 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prayudi, Gusti Muhammad & Dewi Salindri. 2015. Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942. *Publika Budaya*, 1 (3) (Maret 2015): 20-34.
- Penders, Christiaan Lambert Maria. 1968. *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942*. Thesis Ph.D. unpublished. Canberra: Department of Pacific History, The Australian National University.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Salim, Agus dkk. 2007. *Indonesia Belajarlah!*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sukardjo & Ukim Komarudin. 2009. *Landasan Kependidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarno, R.N. Bayu Aji, & Eko Satriya Hermawan. 2019. Ethical Politics and Educated Elites In Indonesian National Movement. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 383: 369-373.
- Suratminto, Lilie. 2013. Educational Policy in The Colonial Era. *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XIV, No. 1 (June 2013): 77-84.
- Suryadinata, Leo. 1972. Indonesian Chinese Education: Past and Present. *Indonesia*, Vol. 14 No. 10 (1972), pp. 49-71. Ithaca, New York, USA: Cornell University Press.
- Sutimin, Leo Agung & T. Suparman. 2012. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.
- Zainu'ddin, Ailsa. 1970. Education in the Netherlands East Indies and the Republic of Indonesia. *Melbourne Studies in Education*, 12 (1) (January 1970): pp. 17-82.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.